

Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia

Adila Misbahussururi¹, Rika Lidyah²

¹²Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia

adilamisba22@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat transparansi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi bank tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi dokumentasi terhadap laporan keuangan tahunan dan informasi relevan lainnya yang dipublikasikan antara tahun tertentu. Evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan syariah, seperti keterbukaan informasi, kesesuaian dengan standar akuntansi syariah, serta kelengkapan dan aksesibilitas pengungkapan laporan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum BSI telah menunjukkan upaya positif dalam menyediakan informasi kepada publik. Namun, tingkat transparansi berada pada kategori "cukup", dikarenakan adanya keterbatasan dalam hal penyajian laporan yang terperinci, keterbacaan, serta konsistensi narasi terkait akad dan distribusi hasil usaha (DHU). Meskipun informasi keuangan dapat diakses melalui situs web perusahaan, peningkatan transparansi masih dapat dilakukan, antara lain melalui penyediaan laporan interaktif, penggunaan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh publik non-akuntan, serta peningkatan frekuensi dan kedalaman pelaporan non-keuangan seperti keberlanjutan dan kepatuhan syariah. Studi ini memberikan masukan konstruktif bagi peningkatan praktik pelaporan keuangan syariah di industri perbankan syariah Indonesia agar lebih akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the level of financial reporting transparency in Bank Syariah Indonesia (BSI) using secondary data obtained from the bank's official website. The research method employed is descriptive qualitative with a documentation study approach, focusing on annual financial reports and other relevant disclosures published during a specific period. The evaluation is based on key principles of Islamic financial reporting transparency, including information disclosure, compliance with Islamic accounting standards, and the completeness and accessibility of report disclosures. The findings indicate that, in general, BSI has made commendable efforts in providing financial information to the public. However, the level of transparency is categorized as "moderate" due to limitations in the depth and detail of financial reporting, clarity of presentation, and consistency in narrative disclosures related to Islamic contracts and profit distribution (DHU). Although financial reports are accessible through the official website, further improvements can be made through the provision of interactive reporting formats, simplified language for non-accounting users, and more frequent and in-depth reporting on non-financial aspects such as sustainability and sharia compliance. This study provides constructive input for enhancing Islamic financial reporting practices in Indonesia's Islamic banking industry to promote greater accountability, inclusivity, and responsiveness to stakeholder needs.



Mengutip artikel ini sebagai : Misbahussururi, A, dan Lidyah, R. 2025. Evaluasi Transparansi Laporan Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia. Tangible Jurnal, 10, No. 1, Juni 2025, Hal. 168-176. <https://doi.org/10.53654/tangible.v10i1.617>

Volume 10

Nomor 1

Halaman 168-176

Makassar, Juni 2025

p-ISSN 2528-3073

e-ISSN 24656-4505

Tanggal masuk

3 Juni 2025

Tanggal diterima

9 Juni 2025

Tanggal dipublikasi

11 Juni 2025

Kata kunci :

Transparansi, Laporan Keuangan Syariah, Bank Syariah Indonesia, Data Sekunder, Akuntansi Syariah

Keywords :

Transparency, Islamic Financial Reporting, Bank Syariah Indonesia, Secondary Data, Islamic Accounting.

PENDAHULUAN

Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Syariah (SIAKS) merupakan subsistem penting dalam struktur tata kelola lembaga keuangan syariah. Fungsinya tidak hanya

terbatas pada pencatatan dan pelaporan transaksi keuangan semata, tetapi juga menjadi instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas dan transparansi terhadap para pemangku kepentingan. SIAKS memiliki peran strategis dalam menghasilkan laporan keuangan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi keuangan yang berlaku umum (*Generally Accepted Accounting Principles/GAAP*), tetapi juga memperhatikan ketentuan hukum Islam, khususnya prinsip keadilan, keterbukaan, serta larangan terhadap riba, gharar, dan maysir (Zulkifli et al., 2020).

Dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, penerapan SIAKS menjadi semakin krusial mengingat perkembangan industri keuangan syariah yang sangat pesat dalam dua dekade terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Maret 2024, total aset perbankan syariah nasional mencapai Rp 947,19 triliun atau menguasai 7,23% dari total aset perbankan nasional, menunjukkan pertumbuhan yang stabil dari tahun ke tahun (OJK, 2024). Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi syariah, termasuk dalam aspek transparansi pelaporan keuangan (Lestari et al., 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI), yang secara resmi berdiri pada 1 Februari 2021 sebagai hasil penggabungan tiga bank syariah milik Badan Usaha Milik Negara (BRI Syariah, BNI Syariah, dan Bank Syariah Mandiri), saat ini menjadi aktor sentral dalam ekosistem perbankan syariah nasional. Hingga kuartal pertama tahun 2024, BSI mencatat total aset sebesar Rp 408,6 triliun dan laba bersih mencapai Rp 7,02 triliun, naik signifikan dari Rp 4,26 triliun pada tahun 2022 (*BSI Annual Report*, 2024). Pertumbuhan ini menjadikan BSI tidak hanya sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, tetapi juga sebagai salah satu entitas keuangan syariah terkemuka di Asia Tenggara.

Meski demikian, keberhasilan finansial sebuah bank syariah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran aset dan laba, tetapi juga oleh kualitas implementasi prinsip *good corporate governance* (GCG), khususnya dalam aspek transparansi. Prinsip transparansi menjadi fundamental dalam keuangan syariah karena mencerminkan tanggung jawab moral dan spiritual kepada Allah SWT dan tanggung jawab sosial kepada umat. Transparansi laporan keuangan syariah tidak hanya mencakup penyampaian data keuangan secara lengkap dan akurat, tetapi juga kejelasan informasi terkait akad-akad yang digunakan, pengelolaan dana sosial (zakat, infak, sedekah), pembagian keuntungan (*profit sharing*), serta kepatuhan terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Senapan dan Senapan, 2023).

Pemerintah melalui OJK telah mengatur aspek keterbukaan dan publikasi informasi melalui Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Regulasi ini mewajibkan bank syariah untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, dapat diakses publik, dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Salah satu standar penting dalam hal ini adalah PSAK 101 yang mengatur format dan elemen-elemen wajib dalam laporan keuangan syariah, seperti laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan perubahan dana investasi tidak terikat, dan catatan atas laporan keuangan (Nastiti, 2022).

Walaupun kerangka regulasi dan standar telah tersedia, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Berbagai studi menunjukkan bahwa sebagian bank syariah di Indonesia masih menghadapi kendala dalam menyajikan laporan keuangan yang mudah diakses, informatif, dan sesuai dengan standar syariah (Ramdani dan Ibrahim, 2022). Beberapa bank dinilai kurang transparan dalam menjelaskan risiko keuangan, metode perhitungan bagi hasil, serta komitmen terhadap

prinsip syariah dalam kegiatan operasional. Hal ini berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah dan mereduksi nilai-nilai etika yang seharusnya menjadi keunggulan utama sistem keuangan Islam.

Sebagai bank syariah terbesar dan representatif di Indonesia, BSI memiliki tanggung jawab strategis untuk menjadi *benchmark* dalam praktik pelaporan keuangan yang transparan dan sesuai syariah. Melalui situs web resminya (<https://www.bankbsi.co.id>), BSI secara rutin mempublikasikan laporan keuangan tahunan, laporan triwulanan, laporan keuangan konsolidasi, serta informasi tambahan seperti laporan pengelolaan dana sosial dan laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Misalnya, dalam laporan tahunan BSI tahun 2023, disajikan informasi mengenai jenis akad yang digunakan (*murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*), rincian distribusi pembiayaan sektor produktif dan konsumtif, serta laporan audit kepatuhan syariah oleh DPS BSI (Fadhil et al., 2025).

Namun, beberapa aspek masih dapat ditingkatkan, terutama dalam hal keterbukaan atas risiko syariah (*sharia non-compliance risk*), penjelasan mendalam tentang mekanisme seleksi akad, serta transparansi dalam laporan dana kebijakan dan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara sistematis dan ilmiah terhadap tingkat keterbukaan informasi keuangan syariah yang disajikan oleh BSI, terutama dalam kerangka penilaian terhadap efektivitas SIAKS yang digunakan oleh bank tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi laporan keuangan syariah BSI dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis data sekunder. Data diperoleh melalui dokumentasi laporan keuangan yang diunduh dari situs resmi BSI dan dianalisis berdasarkan kriteria keterbukaan informasi, kelengkapan komponen laporan, kepatuhan terhadap PSAK Syariah, serta aspek aksesibilitas publik. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan literasi keuangan syariah masyarakat, memperkuat sistem tata kelola bank syariah, serta menjadi rujukan bagi regulator dan praktisi dalam menyusun kebijakan transparansi yang berorientasi pada nilai-nilai *maqashid syariah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan, mengkaji, dan mengevaluasi tingkat transparansi laporan keuangan syariah pada Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, yaitu periode 2022 hingga 2024. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai struktur, isi, dan kualitas informasi yang terkandung dalam laporan keuangan BSI, khususnya dalam aspek kesesuaian dengan prinsip-prinsip pelaporan keuangan syariah serta regulasi yang ditetapkan oleh otoritas keuangan nasional.

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi transparansi laporan keuangan BSI berdasarkan beberapa indikator, antara lain: kelengkapan informasi laporan keuangan, keterbukaan atas risiko keuangan dan risiko syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (sebagaimana diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), serta tingkat aksesibilitas publik terhadap laporan-laporan tersebut. Penelitian ini mengkaji sejauh mana BSI memenuhi kewajiban pelaporan yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK Syariah) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), khususnya PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, serta Surat Edaran OJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang transparansi dan publikasi laporan keuangan bank syariah dan unit usaha syariah (Sari dan Giovanni, 2021).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang telah dipublikasikan secara

terbuka kepada masyarakat. Sumber utama data diperoleh dari situs resmi Bank Syariah Indonesia (<https://www.bankbsi.co.id>) serta situs resmi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (<https://www.ojk.go.id>). Dokumen yang dikaji meliputi laporan tahunan (*annual report*), laporan keuangan triwulanan dan tahunan, serta laporan keberlanjutan (*sustainability report*) yang dirilis oleh BSI selama periode 2022–2024. Selain itu, juga diperhatikan laporan dana sosial syariah (zakat, infak, sedekah), laporan audit kepatuhan syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta catatan atas laporan keuangan yang menjelaskan kebijakan akuntansi dan rincian pos-pos utama laporan keuangan (Iryani, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni pengumpulan dan telaah sistematis terhadap laporan keuangan dan dokumen pendukung yang tersedia secara daring. Laporan yang dianalisis meliputi: (1) laporan posisi keuangan (neraca), (2) laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, (3) laporan perubahan ekuitas, (4) laporan arus kas, (5) laporan sumber dan penggunaan dana zakat, (6) laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta (7) catatan atas laporan keuangan. Masing-masing dokumen tersebut dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, yakni:

1. Kelengkapan Informasi, mencakup keberadaan dan kejelasan semua komponen wajib laporan keuangan;
2. Keterbukaan Risiko, yaitu sejauh mana bank mengungkapkan risiko keuangan dan risiko syariah yang dihadapi;
3. Kepatuhan Syariah, yaitu kesesuaian aktivitas dan penyajian laporan dengan ketentuan syariah yang berlaku dan fatwa DSN-MUI; dan
4. Aksesibilitas Publik, yakni kemudahan akses dan keterbukaan informasi bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk nasabah, investor, dan masyarakat umum.

Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan konten (*content analysis*), yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasi isi laporan berdasarkan indikator transparansi yang telah ditetapkan. Hasil analisis tersebut selanjutnya digunakan untuk memberikan evaluasi sejauh mana praktik pelaporan keuangan syariah BSI telah mencerminkan nilai-nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar keuangan syariah yang berlaku. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi peningkatan praktik tata kelola keuangan syariah, serta menjadi masukan konstruktif bagi BSI dan otoritas pengawas dalam memperkuat sistem pelaporan keuangan yang berorientasi pada *maqashid syariah* (Widiyanti, 2025).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kinerja Keuangan BSI Tahun 2022–2024

Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan kinerja keuangan yang impresif sepanjang tahun 2022 hingga kuartal III 2024. Berdasarkan data yang dipublikasikan dalam laporan tahunan dan kuartalan resmi BSI serta didukung oleh data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terjadi tren pertumbuhan yang konsisten dari sisi aset, laba bersih, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Pada tahun 2022, total aset BSI tercatat sebesar Rp305,73 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp353,62 triliun pada 2023. Memasuki kuartal III tahun 2024, total aset tumbuh lagi menjadi Rp370,72 triliun. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa BSI mampu mempertahankan ekspansi bisnisnya secara konsisten (Chandra dan Shauki, 2024).

Peningkatan laba bersih turut mencerminkan efisiensi operasional dan profitabilitas yang sehat. Pada tahun 2022, laba bersih sebesar Rp4,26 triliun meningkat menjadi Rp5,70 triliun pada 2023, atau naik sekitar 33,8%. Pada kuartal III tahun 2024,

laba bersih yang dibukukan mencapai Rp5,11 triliun, meningkat 21,6% dibandingkan kuartal III 2023. Dengan demikian, diproyeksikan laba bersih tahun penuh 2024 berpotensi mencapai Rp6,8–7,0 triliun jika tren ini berlanjut hingga akhir tahun. Selain itu, dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun juga menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada 2022, DPK tercatat Rp261,49 triliun, dan meningkat menjadi Rp296,48 triliun pada akhir 2023. Hingga kuartal III 2024, DPK mencapai Rp301,22 triliun. Kenaikan ini menandakan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah, khususnya melalui akad-akad berbasis prinsip *mudharabah* dan *wadiah* (Ramadhani, 2022).

Pembiayaan yang disalurkan juga mengalami peningkatan dari Rp205,52 triliun pada 2022 menjadi Rp247 triliun pada 2023, dan mencapai Rp266,46 triliun per kuartal III 2024. Hal ini menunjukkan bahwa BSI secara aktif menjalankan fungsi intermediasinya sebagai lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan dana ke sektor riil. Secara keseluruhan, indikator keuangan tersebut menunjukkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan, serta efisiensi pengelolaan aset dan kewajiban. Kinerja ini memberikan gambaran bahwa BSI telah menjadi salah satu bank syariah terkemuka tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tingkat Asia Tenggara (Titania dan Taqwa, 2023).

Transparansi dan Keterbukaan Informasi Keuangan

Evaluasi terhadap transparansi dilakukan melalui analisis terhadap dokumen laporan keuangan publikasi BSI, terutama yang dirilis melalui situs resmi perusahaan dan OJK. Secara umum, BSI telah memenuhi aspek transparansi dalam empat dimensi utama: kelengkapan laporan, kepatuhan terhadap standar syariah, keterbukaan risiko, dan aksesibilitas publik (Mutia dan Selatan, 2025).

1. Kelengkapan Laporan Keuangan

BSI menyajikan laporan keuangan secara komprehensif sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah) yang diatur dalam PSAK 101 hingga PSAK 112. Laporan tersebut mencakup:

- a. Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
- b. Laporan Laba Rugi Komprehensif
- c. Laporan Perubahan Ekuitas
- d. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
- e. Laporan Dana Kebajikan
- f. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Semua dokumen tersebut tersedia secara terbuka di situs resmi BSI dalam format PDF dan dapat diakses oleh publik tanpa hambatan.

2. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah

Keunikan laporan keuangan BSI terletak pada adanya opini dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan operasional telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, laporan dana sosial (zakat, infak, sedekah) dipublikasikan secara terpisah sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan. Penyajian akad-akad pembiayaan, seperti *murabahah*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah*, dijelaskan secara eksplisit dalam laporan keuangan (Gusrianti dan Violita, 2021).

3. Keterbukaan Risiko dan Cadangan Kerugian

Peningkatan CKPN dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia (BSI) secara transparan menyajikan informasi terkait risiko pembiayaan dan upaya mitigasinya melalui pencadangan yang memadai. CKPN adalah akun akuntansi yang digunakan untuk mengantisipasi potensi kerugian akibat

pembiayaan bermasalah (*non-performing financing*). Oleh karena itu, adanya data CKPN yang jelas dan rinci mengindikasikan :

- a. Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dalam pengelolaan risiko, sesuai dengan standar akuntansi syariah dan regulasi OJK.
- b. Komitmen BSI terhadap transparansi, karena CKPN merupakan bagian penting dalam menggambarkan kualitas aset dan potensi risiko keuangan yang dihadapi bank.
- c. Upaya proaktif dalam mengelola risiko pembiayaan, yang juga memberikan keyakinan kepada pemangku kepentingan bahwa bank tidak menyembunyikan risiko dan telah menyiapkan langkah mitigasi yang realistis.

Data CKPN BSI:

- a. Tahun 2022: Rp4,18 triliun
- b. Tahun 2023: Rp4,36 triliun
- c. Kuartal III 2024: Rp4,27 triliun

Walaupun terjadi peningkatan dari 2022 ke 2023, penurunan sedikit di Kuartal III 2024 (dibandingkan akhir 2023) menunjukkan adanya perbaikan atau stabilisasi kualitas pembiayaan, namun tetap dalam kisaran tinggi. Ini dapat ditafsirkan sebagai bukti bahwa BSI menjaga transparansi sekaligus memperkuat cadangan terhadap potensi kerugian, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi pasca-pandemi dan tantangan global. Jadi, jika CKPN semakin tinggi, dan disertai penyajian yang terbuka dan rinci, maka analisisnya menunjukkan bahwa BSI tidak hanya transparan tetapi juga tanggap terhadap risiko pembiayaan yang muncul, dengan strategi pengelolaan risiko yang terukur dan akuntabel. Hal ini memperkuat persepsi publik terhadap integritas dan profesionalisme laporan keuangan syariah BSI.

4. Aksesibilitas Digital dan Keterbukaan Informasi

Semua laporan keuangan, baik tahunan maupun triwulanan, tersedia secara terbuka di situs web resmi BSI dan OJK. Selain itu, publikasi infografis kinerja kuartalan dan laporan tahunan versi ringkas juga disediakan, sehingga masyarakat umum dapat dengan mudah mengakses dan memahami informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan SEOJK No. 10/SEOJK.03/2020 tentang kewajiban transparansi dan publikasi bank syariah (Fadhil, dkk. 2025).

Evaluasi Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

BSI telah menunjukkan komitmen tinggi terhadap tata kelola perusahaan yang baik. Dalam laporan tahunan 2023, BSI memperoleh peringkat “Baik” (skor 2) dalam *self-assessment* penerapan GCG. Selain itu, BSI memperoleh penghargaan sebagai “*The Most Trusted Company*” dalam ajang *Corporate Governance Perception Index* (CGPI) 2023 yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance* (IICG) bekerja sama dengan Majalah SWA. Kepatuhan terhadap GCG mencakup aspek keterbukaan informasi, independensi organ perusahaan, akuntabilitas pengambilan keputusan, serta tanggung jawab sosial perusahaan. BSI juga melakukan penguatan fungsi audit internal, pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta pelatihan berkelanjutan bagi karyawan tentang kepatuhan syariah dan etika kerja (Chandra dan Shauki, 2024).

Integrasi ESG (*Environment, Social, and Governance*)

Dalam rangka membangun bank syariah yang berkelanjutan, BSI juga mengintegrasikan prinsip ESG dalam operasionalnya. Pada kuartal III 2023, BSI mencatat:

1. Reduksi emisi karbon sebesar 63,4 ton CO₂

2. Daur ulang limbah plastik sebesar 17,2 ton

3. Penyaluran dana CSR sebesar Rp177,5 miliar untuk program social

Program CSR BSI meliputi bantuan UMKM, pembangunan sarana ibadah, pendidikan, dan konservasi lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial tidak hanya formalitas, tetapi menjadi bagian integral dari strategi bisnis syariah yang berorientasi pada keberkahan dan kebermanfaatan public (Utami, 2023).

Implikasi Strategis dan Rekomendasi

Hasil analisis ini menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan BSI tidak hanya memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga memiliki nilai strategis dalam memperkuat reputasi bank syariah, menarik minat investor, dan meningkatkan literasi publik. Namun demikian, masih terdapat beberapa ruang perbaikan:

1. Penyajian laporan interaktif berbasis digital (misalnya dashboard keuangan syariah) untuk memperluas pemahaman masyarakat awam
2. Penambahan ulasan manajemen risiko syariah secara lebih edukatif
3. Inovasi dalam publikasi multimedia untuk laporan tahunan
4. Rekomendasi tersebut bertujuan untuk menjadikan BSI sebagai model transparansi syariah yang modern dan progresif di Indonesia (Widiyanti, 2025).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui analisis data sekunder terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan secara daring oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) selama periode 2022 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa secara umum BSI telah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dalam pelaporan keuangan syariah. Hal ini tercermin dari penyajian laporan yang lengkap dan sesuai dengan standar PSAK Syariah, ketaatan terhadap fatwa DSN-MUI yang dibuktikan melalui opini Dewan Pengawas Syariah, serta keterbukaan atas risiko pembiayaan dan cadangan kerugian yang dijelaskan secara rinci.

Laporan keuangan BSI juga memenuhi unsur aksesibilitas publik, di mana seluruh dokumen dipublikasikan secara terbuka melalui situs web resmi dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat umum. BSI juga telah menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi OJK terkait transparansi dan pelaporan, serta mengintegrasikan prinsip ESG (*Environment, Social, and Governance*) dalam praktik keuangannya. Namun demikian, terdapat beberapa area yang masih dapat ditingkatkan, seperti penyajian informasi dalam format digital interaktif, penjelasan manajemen risiko syariah secara lebih edukatif, serta diversifikasi media publikasi untuk menjangkau khalayak yang lebih luas.

Secara keseluruhan, transparansi laporan keuangan syariah BSI dapat dikategorikan baik dan mencerminkan implementasi tata kelola syariah yang akuntabel. Kendati demikian, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, BSI tetap dituntut untuk terus meningkatkan inovasi dalam penyampaian informasi agar lebih informatif, inklusif, dan berorientasi pada maqashid syariah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat literasi keuangan syariah dan mendorong praktik pelaporan yang lebih transparan dan terpercaya di industri perbankan syariah nasional. Bagian ini berisi simpulan tentang inti temuan penelitian, kelemahan penelitian yang merupakan kekurangan yang dijumpai peneliti pada saat pelaksanaan riset.

DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, B. A., dan Shauki, E. R. (2024). Evaluasi pengungkapan laporan keberlanjutan berdasarkan GRI Framework pada PT. Bank Syariah Indonesia. *Owner*, Vol 8 No. 2, Hal. 1786–1796. <https://doi.org/10.33395/owner.v8i2.2059>
- Fadhil, M. I., Ahmadi, N., dan Rahmani, B. (2025). Evaluasi kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia dengan pendekatan risk profile, good corporate governance, earnings, dan capital. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol.13 No.1, Hal. 67–87. <https://doi.org/10.61111/jakis.v13i1.871>
- Gusrianti, G., dan Violita, E. S. (2021). Cross-country analysis of transparency of risk information in Islamic banks: Measurement and effect of Islamic corporate governance. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, Vol.13 No. 1, Hal. 144–160. <https://doi.org/10.17509/jaset.v13i1.29651>
- Iryani, L. D. (2024). Quality of financial reporting and the level of compliance with SAS: A case study of Islamic banking in Indonesia. *International Conference on Accounting and Finance*, Vol.2, Hal.421–439.
- Lestari, A., Susilowati, D., dan Ulfah, P. (2022). Implementasi Zakat Core Principle (ZCP): Suatu telaah audit lembaga amal zakat dalam menciptakan transparansi serta akuntabilitas (Studi pada BAZNAS dan Dompot Dhuafa). *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, Vol 4 No.1, Hal. 1–15. <https://doi.org/10.32424/1.ijibe.2022.4.1.8711>
- Mutia, D. K., dan Selatan, T. (2025). Regulasi pelaporan ESG pada emiten sektor keuangan Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, Vol. 8 No.1, Hal. 104–124.
- Nastiti, A. S. (2022). Implementasi akad musyarakah dalam produk pembiayaan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol.7 No.1, Hal. 1–19. <https://doi.org/10.47435/adz-dzahab.v7i1.818>
- Ramadhani, N. H. N. (2022). Analisis tingkat kesehatan bank syariah dengan metode RGEC dan financial distress (Studi pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2019-2023). *Diponegoro Journal of Accounting*, Vol. 14 No.2, Hal. 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Sari, R. D. P., dan Giovanni, A. (2021). Analisis kinerja keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen: Jurnal Ilmiah Multi Science*, Vol.12 No.2, Hal. 71–85. <https://doi.org/10.52657/jiem.v12i2.1589>
- Senapan, A. H. A., dan Senapan, E. S. (2023). Pengaruh penerapan good corporate governance terhadap profitabilitas pada Bank Umum Syariah periode 2018–2022. *Seminar Nasional Akuntansi dan Call for Paper (SENAPAN)*, Vol.3 No.1, Hal. 122–133. <https://doi.org/10.33005/senapan.v3i1.292>
- Titania, H., dan Taqwa, S. (2023). Pengaruh good corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Vol.5 No.3, Hal. 1224–1238. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i3.795>

- Utami, I. S. (2023). Transparency and performance of Islamic banking: The implications for profit distribution (Empirical study of Indonesia and Malaysia). *Formosa Journal of Science and Technology*, Vol.2 No.3, Hal.987-1002. <https://doi.org/10.55927/fjst.v2i3.3298>
- Widiyanti, O. (2025). Analisis evaluasi kinerja keuangan PT Bank Syariah Indonesia Tbk berdasarkan metode CAMEL dan metode Sharia Conformity and Profitability (SCnP). *Jurnal Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam*, Vol.7, Hal. 1-15.